



FASILITAS PUBLIK DAN PERKANTORAN TERBATAS

Yogya Gagas Menabung Tanah

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta mewacanakan program bank untuk menabung tanah dengan membeli lahan milik warga. Cara itu untuk mengendalikan lahan untuk kepentingan publik seperti pembangunan fasilitas kantor pemerintah ke depan dan fasilitas publik lainnya.

"Menabung tanah ini kami prioritaskan dulu untuk ruang-ruang publik, fasilitas publik dan perkantoran, sebagai antisipasi perkembangan kota ke depan," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Kamis (29/3).

Menurutnya, jika tidak sejak awal menabung tanah, maka ke depan tidak akan mendapat lahan yang memadai untuk fasilitas publik dan perkantoran. Akibatnya proses pembangunan dan tata kota menjadi terhambat. Pihaknya berkaca pada beberapa kasus lahan kosong yang seharusnya direncanakan menjadi ruang publik dan disetujui masyarakat, tapi tidak terealisasi. Itu karena lahan sudah berpindah kepemilikan ke pengusaha untuk usaha.

"Pemerintah tidak cepat mengesekusinya sehingga sudah pindah kepemilikan dan sulit untuk dibeli pemerintah. Tapi tabungan tanah ini pemkot tidak mencari lahan untuk dibeli. Kalau ada masyarakat yang ingin menjual lahannya, pemkot yang akan berupaya membelinya," terangnya.

Dia menilai tabungan tanah juga bisa menjadi solusi mengendalikan harga tanah di Yogyakarta yang cenderung tinggi dan berpotensi dikuasai beberapa pihak untuk kepentingan ekonomi. Dampaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah akan semakin sulit memiliki lahan untuk membangun rumah. "Arahnya ke depan tabungan tanah juga untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Heroe.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana menyatakan tabungan tanah dapat diawali dengan rencana pengadaan tanah di tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Terutama OPD yang memiliki program dan membutuhkan lahan untuk kepentingan publik dan perkantoran. "Tiap OPD bisa melaku-

kukan perencanaan pengadaan lahan yang dibutuhkan, agar bisa diusulkan dalam penganggaran. Misalnya Dinas Pertanian dan Pangan ada program pertanian perkotaan, bisa mencari lahan kering yang tidak dimanfaatkan warga. Kalau mau dijual maka pemerintah akan membelinya," ucap Hari.

Selama ini Pemkot Yogyakarta telah melakukan pembelian lahan milik warga untuk ruang terbuka hijau publik. Pada tahun 2018 Pemkot Yogyakarta rencananya membeli lahan milik warga untuk ruang terbuka hijau publik di wilayah Kelurahan Purbayan, Muja Muju, Mantrijeron dan Karangwaru dengan luas mulai dari sekitar 300 meter persegi. Pemilihan wilayah tersebut menjadi ruang terbuka hijau publik itu berdasarkan usulan warga. (Tri)-m

Instansi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005